

BAB VII

REFLEKSI KONSEP KEMASLAHATAN PANCASILA

“The differentiating characteristics are recognized and provide new and expanded spaces for reflection and new understandings”
(Dillard dan Reynolds, 2011:497)

7.1 Pengantar

Bab ini merupakan langkah akhir dalam konstruksi alternatif laba dalam perspektif Pancasila. Peletakan refleksi dalam penelitian ini merupakan hal yang penting karena setiap karakteristik dari akuntansi yang memberikan bentuk berbeda pada dasarnya merefleksikan pemaknaan berbeda (Dillard dan Reynolds, 2011). Selain itu, roh dari penelitian nonpositivis (khususnya akuntansi) terletak pada seberapa jauh seorang peneliti merefleksikan temuannya bagi peradaban (Kamayanti, 2016c). Dalam hal ini, refleksi penulis pada dasarnya menunjukkan keyakinan terhadap paradigma penelitian yang dianut (Gaffikin, 2009).

Pembahasan sebelumnya telah menguraikan konsep Kemaslahatan Pancasila sebagai laba berbasis Pancasila. Konstruksi terhadap konsep Kemaslahatan Pancasila tidak serta-merta berasal dari teori yang datang sekaligus, melainkan berawal dari jati diri manusia, sifat dan keberadaan Tuhan, serta tujuan dari akuntansi. Setelah konstruksi ini dilakukan, reflektivitas merupakan hal yang penting untuk menelaah konsekuensinya bagi pengembangan akuntansi, khususnya di Indonesia. Bahkan, reflektivitas juga perlu dilakukan untuk menelaah perubahan proses bisnis yang terjadi ketika konsep ini diterapkan.

Dalam melakukan refleksi, saya tetap membandingkan konsep Kemaslahatan Pancasila dengan laba dan PAT. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya konsep ini lahir dari adanya problematika terhadap laba dan PAT. Selain itu, perbandingan terhadap laba dan PAT juga dilakukan untuk menelaah perubahan yang terjadi ketika konsep Kemaslahatan Pancasila menjadi realitas di dunia ini, khususnya pada aspek peradaban.

7.2 Akuntansi Berbasis Gotong Royong

“Gotong Royong is a dynamic concept, more dynamic than family principle, friends. The family principle is a static concept, but Gotong Royong portrays one endeavour, one act of service, one task, what was called by Mr. Sukardjo one Karyo (Work), one gawe (Task). Let us complete this karyo (Work), this gawe (Task), this task, this act of service, together. Gotong Royong means toiling hard together, a joint struggle to help one another. Acts of service by all for the interest of all. Ho-lopis-kuntul-baris- one, two, three, heave !!! for the common interest. That is Gotong Royong.”
(Soekarno, 1963)

Kajian mengenai laba berbasis Pancasila pada dasarnya mengarah ke dalam satu konsep utama, yaitu gotong royong. Gotong royong merupakan muara dari seluruh nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Ketika Soekarno (1945) menyempitkan nilai-nilai Pancasila dalam trisila dan ekasila, gotong royong merupakan rumusan utama. Dalam hal ini, Soekarno (1960) melihat perlunya nilai utama dalam segala aspek kehidupan yang dapat membangun tatanan dunia (bukan hanya Indonesia) yang baru dan gotong royong merupakan jawaban atas urgensi tersebut. Oleh karena itu, gotong royong (sebagai manifestasi Pancasila) menjadi yang bersifat universal sekaligus menjadi semangat untuk membangun keutuhan peradaban (Cahyanto, 2012).

Gotong royong merupakan nilai asli bangsa Indonesia yang telah ada sebelum negara ini merdeka. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam dalam segala aspek dan perlu nilai pemersatu untuk menciptakan

tatanan yang utuh. Hal ini terjadi bukan dalam saat ini semata, melainkan sejak zaman dahulu. Gotong royong merupakan nilai pemersatu yang menjadi asas kesepakatan bersama. Bahkan, gotong royong merupakan kesepakatan bersama masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Oleh karena itu, Soekarno (1963) tidak menerjemahkan frasa gotong royong dalam bahasa asing, tetapi tetap mempertahankan dalam konteks Indonesia.

Kesadaran terhadap semangat gotong royong sudah menjadi budaya bangsa Indonesia sejak dahulu. Pada aspek ekonomi, budaya gotong royong sudah tertanam melalui pasar tradisional (Nadjib, 2013; Wiyarni *et al.*, 2014). Para pemasok, pedagang, sampai konsumen pasar tradisional bersama-sama menemukan kesepakatan mengenai sistem produksi ataupun penjualan. Sikap seperti itu tidak dilakukan atas dasar keuntungan pribadi, tetapi kemaslahatan bagi setiap pelaku ekonomi. Bahkan, beberapa tulisan menunjukkan bahwa letak pasar tradisional bersebelahan dengan tempat ibadah sebagai manifestasi dari nilai ketuhanan (Triuwono, 2003a; Tjokroaminoto, 2010; Mulawarman, 2013a; Wiyarni *et al.*, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa nilai gotong royong seharusnya menjadi dasar bagi sistem perekonomian (dan akuntansi) Indonesia di tengah tuntutan terhadap persaingan global yang semakin masif.

Dalam kaitannya dengan laba, gotong royong merupakan nilai terpenting dalam rangka mewujudkan proses bisnis yang utuh. Hal inilah yang termanifestasi dalam konsep Kemaslahatan Pancasila. Konsep kemaslahatan, yang berfokus kepada proses bisnis berbasis kebersamaan, menekankan bahwa akuntansi harus memiliki arah untuk mempersatukan seluruh pelaku ekonomi. Dalam hal ini, kepentingan semua pelaku ekonomi terakomodasi selama hal tersebut membawa kemaslahatan bagi setiap realitas kehidupan. Implikasinya, persaingan antarpelaku ekonomi menjadi hal yang tidak dibenarkan dan hubungan saling

percaya harus dibangun. Hal ini kemudian membuat hubungan saling membangun dan melengkapi antarpelaku ekonomi.

Pada sisi lainnya, penggunaan asas gotong royong dalam konsep Kemaslahatan Pancasila memiliki beberapa konsekuensi terhadap proses bisnis dan pengembangan akuntansi. *Pertama*, kesuksesan sistem perekonomian tidak lagi bergantung atau ditujukan kepada golongan tertentu. Sistem perekonomian (termasuk akuntansi) berbasis Pancasila pada dasarnya dirancang bagi semua masyarakat dan alam semesta (dalam ketertundukan kepada Tuhan) sehingga kebergantungan dan keberpihakan kepada golongan tertentu menjadi hal yang tidak dibenarkan (Latif, 2012; Parikesit, 2012b). Konsep Kemaslahatan Pancasila mengarahkan setiap golongan untuk memiliki peran dan porsi keterlibatan yang saling melengkapi sehingga tidak terdapat pihak yang lebih penting ataupun tidak.

Sifat ketidakbergantungan terhadap individu pada dasarnya sesuai dengan semangat persaudaraan dalam konsep Kemaslahatan Pancasila. Semangat persaudaraan tidak terbatas kepada hubungan formal antarentitas, tetapi kesamaan rasa dan karsa dalam membangun perekonomian (termasuk akuntansi) (Sitorus, 2015). Setiap pihak harus bersinergi dan saling melengkapi dalam setiap proses bisnis sehingga tidak terdapat rasa curiga antargolongan (Cahyanto, 2012). Semangat seperti ini melahirkan hubungan saling percaya dan membangun antarkalangan dalam sistem perekonomian. Dalam perkataan lain, hubungan seperti ini bersifat antitesis terhadap teori agensi (sebagai dasar dalam PAT dan laba) yang menekankan keberpihakan kepada pemilik modal dan semangat individualitas (Sitorus, Habibaty dan Triyuwono, 2016).

Jika kita mendalami dalam filosofi sistem ekonomi, terdapat makna bahwa kegagalan negara disebabkan oleh sistem perekonomian yang sangat bergantung dan berpihak kepada golongan tertentu (Latif, 2014). Sifat kebergantungan dan keberpihakan kepada golongan tertentu pada dasarnya memancing keserakahan

untuk meraih keuntungan bagi mereka. Hal ini tidak terbatas kepada kecurangan laporan keuangan semata, tetapi berbagai kebijakan dan sistem ekonomi (termasuk akuntansi) yang berpihak (Hines, 1989). Dalam jangka pendek ataupun panjang, hal tersebut melahirkan krisis dan ketidakpercayaan antarpelaku ekonomi negara (Arnold, 2012). Oleh karena itu, kebergantungan dan keberpihakan kepada golongan tertentu harus dihindari untuk menghindari hal tersebut.

Konsekuensi seperti ini kemudian mengarah kepada hakikat bangsa Indonesia sebagai kapal pinisi. Sebuah kapal pinisi terdiri atas banyak golongan manusia, seperti nahkoda, nelayan, ataupun pendayung. Masing-masing pihak memiliki peran yang berbeda. Meskipun demikian, setiap golongan memiliki urgensi terhadap operasional kapal sehingga tidak terdapat pihak yang memiliki keistimewaan tersendiri. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pengembangan akuntansi berbasis Pancasila untuk membangun sistem berbasis kesejahteraan bersama. Akuntansi berbasis Pancasila harus bisa membangun landasan ontologi hingga aksiologi untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak sehingga terdapat hubungan yang saling melengkapi dalam sistem ekonomi.

Kedua, laba berbasis gotong royong mengarahkan setiap golongan masyarakat untuk mandiri. Kemandirian bangsa pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari sikap tidakbergantungan terhadap golongan. Sifat kebersamaan dalam konsep Kemaslahatan Pancasila menuntun setiap manusia untuk saling bersinergi dalam rangka menjadi bangsa yang mandiri. Hal ini berangkat dari argumentasi bahwa kemandirian bangsa dapat dicapai ketika setiap manusia saling bekerja sama untuk mewujudkan suatu sosial yang saling melengkapi (termasuk akuntansi). Selain itu, kemandirian seharusnya menjadi arah bagi bangsa Indonesia karena telah dikaruniai oleh Tuhan sumber daya manusia dan alam yang melimpah.

Pada sisi lainnya, sebuah paradoks terjadi dalam pertumbuhan negara dengan sumber daya alam melimpah (Parikesit, 2012b). Negara-negara yang memiliki sumber daya manusia dan alam melimpah mengalami pertumbuhan ekonomi lambat dan bergantung kepada kebijakan pihak lain. Sebaliknya, negara-negara maju justru memiliki kekurangan sumber daya manusia ataupun alam sehingga terdapat sebuah keanehan dalam pertumbuhan ekonomi global. Meskipun demikian, keanehan tersebut terjadi karena dominasi politik dan kekuasaan global yang dilakukan oleh negara maju sehingga terjadi hubungan ketergantungan (termasuk akuntansi) (Arnold, 2012). Oleh karena itu, pencapaian bangsa untuk mencapai kemandirian bukanlah hal yang mudah.

Meskipun kemandirian bangsa tidak mudah, hal tersebut merupakan sebuah keharusan. Kemandirian bangsa ditujukan untuk memiliki jati diri (identitas) dalam melakukan hubungan global. Sikap mandiri memang tidak ditujukan untuk menjadi bangsa yang mengabaikan keberadaan pihak lain. Hubungan antarpihak tetap diperlukan karena bangsa tidak dapat berdiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Meskipun demikian, sikap mandiri dalam konsep Kemaslahatan Pancasila juga ditujukan untuk menjadi bangsa yang selalu bergantung kepada pihak lain. Dalam hal ini, kemandirian bangsa merupakan pintu gerbang pembentukan negara yang berdaulat (termasuk pada aspek akuntansi).

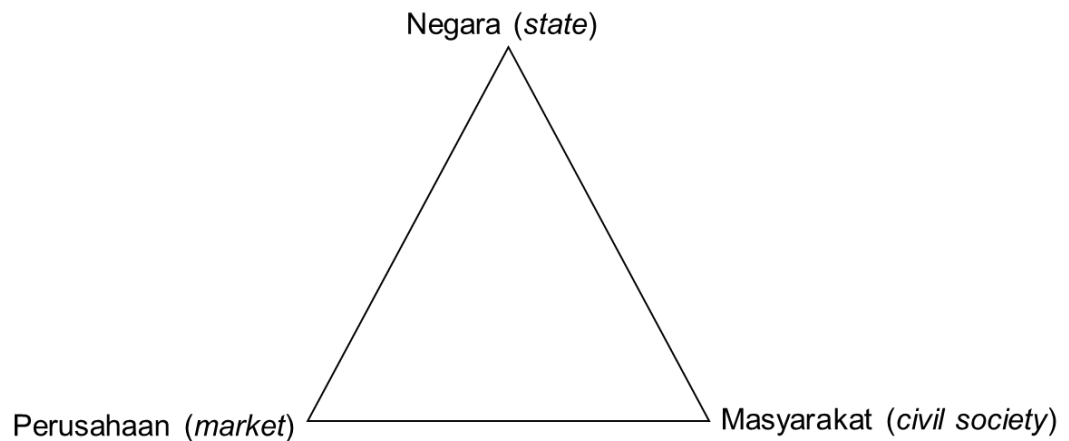
Sikap ini tentu memberikan arah bahwa Indonesia sejatinya tidak membutuhkan sistem akuntansi yang berlandaskan kepada negara lain³⁶. Indonesia dapat mendirikan sistem akuntansi dengan berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila dan hal tersebut merupakan sebuah keharusan. Bahkan, Indonesia dapat keluar dari keanggotaan IFAC (yang berkontribusi terhadap terbentuknya IFRS dan pendidikan akuntansi dengan sistem liberal) karena nilai yang

³⁶ Hal ini senada dengan pendapat Sy dan Tinker (2013) yang menyatakan bahwa Afrika tidak membutuhkan IFRS.

ditawarkan oleh organisasi tersebut tidak sesuai dengan landasan ideologi sekaligus sebagai upaya pemasyarakatan konsep Kemaslahatan Pancasila. Indonesia, dengan beragam pelaku ekonomi dan sistem ideologi yang berbeda, seharusnya mampu membuat sistem akuntansi sendiri.

Kunci dari kemandirian tersebut adalah kemauan bersama dari setiap manusia Indonesia untuk membentuk sistem akuntansi yang berdaulat. Sistem akuntansi dapat terlaksana ketika setiap manusia memiliki komitmen untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam hal ini, *homo pancasilaus* ataupun konsep Kemaslahatan Pancasila tidak dapat terlaksana selama manusia Indonesia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk dapat membentuk akuntansi berdaulat. Proses pembentukan komitmen tersebut bukanlah hal yang mudah karena harus terdapat reformasi dalam sistem pendidikan dan kehidupan masyarakat Indonesia yang berjiwa Pancasila. Pada titik inilah semangat gotong royong harus tertanam dalam diri seluruh rakyat Indonesia.

Ketiga, negara, masyarakat, dan perusahaan harus saling melengkapi. Ketiga pihak tersebut merupakan aktor penting dalam perekonomian negara (lihat Gambar 7.1). Selain itu, ketiga pihak tersebut memiliki peran yang berbeda dalam menyukseskan jalannya perekonomian negara. Negara, sebagai sebuah regulator sekaligus wadah operasional bisnis, memberikan jalan tengah bagi masyarakat dan korporasi untuk membangun proses bisnis yang utuh. Hal yang sama juga seharusnya berlaku bagi perusahaan, sebagai wadah operasional bisnis, yang tidak berpatokan kepada materi (terutama jika mengacu kepada konsep Kemaslahatan Pancasila). Dalam kaitannya dengan masyarakat, kedua pihak tersebut harus mewujudkan keberpihakan, baik melalui aturan maupun proses bisnis, yang berpihak kepada semangat kerakyatan.

Gambar 7.1 Aktor Perekonomian Negara

Sumber: Parikesit (2012)

Dalam sistem ekonomi (dan akuntansi) berbasis kapitalisme, negara berperan sebagai perusahaan baru yang berimplikasi terhadap liberalisasi sistem ekonomi dan proses bisnis. Liberalisasi tersebut berdampak kepada kebijakan ekonomi (dan akuntansi) yang berpihak kepada perusahaan, tetapi mengabaikan keberadaan rakyat sehingga hubungan antarpihak menjadi tidak simetris. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep Kemaslahatan Pancasila yang juga mengandung nilai kerakyatan (sekaligus manifestasi dari gotong royong). Negara memiliki peran penting sebagai penjaga hubungan simetris antara perusahaan dan masyarakat sehingga kesejahteraan bersama dapat tercapai. Bahkan, Pasal 33 UUD 1945 sejatinya mengamankan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya ditujukan bagi kemaslahatan bersama sehingga harmonisasi pelaku ekonomi merupakan urgensi.

Harmonisasi ketiga hubungan tersebut juga ditujukan untuk menghindari ketimpangan dalam sistem ekonomi dan proses bisnis (termasuk akuntansi). Selama negara, perusahaan, dan masyarakat tidak memiliki titik temu dalam proses bisnis dan sistem ekonomi (termasuk akuntansi). Semangat gotong royong merupakan kata kunci untuk mengatasi ketimpangan perekonomian bangsa. Oleh

karena itu, negara tidak bisa sekadar menjadi alat legitimasi ataupun penjaga keberadaan perusahaan dalam sistem ekonomi yang berdaulat. Sebaliknya, negara harus mendominasi berbagai kebijakan ekonomi dan akuntansi untuk menjamin bahwa semangat gotong royong telah terlaksana dengan baik, termasuk penerapan konsep Kemaslahatan Pancasila.

Ketiga konsekuensi tersebut menunjukkan bahwa gotong royong merupakan landasan utama dalam konsep Kemaslahatan Pancasila. Semangat tersebut pada dasarnya mengarahkan setiap pelaku ekonomi untuk saling bersinergi dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Pada sisi lainnya, semangat gotong royong mengarahkan bangsa untuk memiliki identitas tersendiri untuk mencapai kedaulatan. Laba memiliki peran penting sebagai arah untuk mewujudkan semangat gotong royong pada sistem ekonomi dan proses bisnis.

7.3 Akuntansi sebagai Sarana Penyatuan Setiap Realitas Kehidupan

“Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah-darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah s.w.t. menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah tanah air kita!”
(Soekarno, 1945)

Konsep Kemaslahatan Pancasila tidak sebatas berdampak kepada sikap gotong royong semata. Konsep ini juga memiliki konsekuensi terhadap penyatuan segala realitas kehidupan bangsa Indonesia. Segala realitas kehidupan yang terpisah karena PAT dan laba memusatkan ontologi utama kepada segelintir manusia sehingga persaingan menjadi sesuatu yang lumrah. Konsep Kemaslahatan Pancasila hadir sebagai antitesis dengan menihilkan persaingan tersebut dan menyatukan seluruh hubungan antar-realitas dengan menyinergikan peran setiap pelaku ekonomi dalam seluruh aktivitas ekonomi. Selain itu,

penyatuan dalam konsep Kerahmatan Pancasila tidak hanya terbatas kepada hubungan antarmanusia semata, tetapi juga menyasar kepada hubungan antarrealitas kehidupan lainnya yang berimplikasi terhadap proses bisnis yang tidak terpaku kepada unsur materi.

Penyatuan dalam konsep Kemaslahatan Pancasila memiliki arah bahwa setiap realitas kehidupan memiliki rasa, karsa, dan cipta yang sama, khususnya dalam kaitannya dengan akuntansi. Kesamaan rasa berarti setiap realitas kehidupan memiliki perasaan yang selaras dalam menghadapi fenomena. Kesamaan karsa berarti setiap realitas kehidupan memiliki tujuan yang sama dalam membangun peradaban. Sementara itu, kesamaan cipta berarti setiap realitas kehidupan mampu mengadakan sesuatu yang saling terkait dalam rangka mewujudkan rasa dan karsa. Kesamaan tersebut membuat setiap realitas kehidupan tidak saling mereduksi, tetapi saling melengkapi sehingga sistem ekonomi dan akuntansi bersifat sinergi.

Penyatuan setiap realitas kehidupan menjadi hal yang penting dalam konsep Kemaslahatan Pancasila karena hal ini merupakan tanda bahwa kegiatan ekonomi dan akuntansi berjalan dengan semangat gotong royong. Semangat gotong royong termanifestasi melalui hubungan yang saling bersinergi dan tidak terbatas kepada satu realitas kehidupan semata. Hal ini tidak bisa hanya merujuk kepada hubungan antarmanusia semata karena pada dasarnya sesuatu aktivitas kehidupan (khususnya ekonomi dan akuntansi) selalu melibatkan realitas kehidupan yang terlihat maupun tidak (nonmateri). Bahkan, realitas kehidupan yang tidak terlihat justru memiliki urgensi lebih penting daripada materi.

Pada sisi lainnya, penyatuan terhadap segala realitas kehidupan merupakan puncak dari perjalanan kehidupan duniawi. Setiap perjalanan kehidupan, khususnya pada konteks spiritual, pada dasarnya menuntun manusia untuk menyatu dengan seluruh realitas lainnya (manunggal). Manusia tidak lagi

memosisikan diri sebagai unsur yang berdiri sendiri melainkan turut melebur bersama dengan realitas-realitas kehidupan lainnya dengan peran yang saling melengkapi. Hal ini kemudian mengarahkan manusia (dan akuntansi) untuk tidak lagi memikirkan segala nafsu duniawi dan selalu memusatkan kepada setiap kebaikan bagi kemaslahatan. Konsep Kemaslahatan Pancasila juga mengarahkan akuntansi untuk memiliki arah demikian.

Langkah awal penyatuan tersebut adalah menyatukan manusia dan akuntansi dengan realitas utama kehidupan. Penyatuan realitas utama dalam konsep Kemaslahatan Pancasila adalah keberadaan Tuhan. Konsep Kemaslahatan Pancasila tidak sekadar mengakui keberadaan Tuhan sebagai unsur tertinggi realitas kehidupan, tetapi turut menyatu dalam segala realitas kehidupan, khususnya manusia dan akuntansi sebagai sarana (lihat Bab III dan Bab VI). Manusia diarahkan untuk melakukan ajaran Tuhan melalui berbagai sarana dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan. Sebaliknya, manusia menghindari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Tuhan dengan penuh keikhlasan dan tanpa paksaan, termasuk dalam hal surga atau neraka.

Pada perspektif laba, penyatuan terhadap Tuhan merangsang manusia tidak lagi saling memperebutkan dan meningkatkan keuntungan materi. Manusia menjadi sadar bahwa hidupnya digunakan bagi kepentingan Tuhan sehingga materi bukan urgensi. Sebaliknya, manusia menegaskan keberadaan materi dan fokus terhadap kehendak Tuhan. Hal ini juga ditunjang oleh pandangan bahwa kelima nilai Pancasila sejatinya tidak mengarahkan manusia untuk mengejar materi. Kelima nilai Pancasila pada dasarnya mengarahkan manusia untuk menjadi pribadi yang menggunakan hikmat dan kebijaksanaan. Hal tersebut dicerminkan melalui sikap lepas dari materi.

Penyatuan ini tidak terbatas kepada koridor ajaran Tuhan secara tertulis (kitab suci), tetapi turut termanifestasi dalam budaya masyarakat Indonesia.

Bangsa Indonesia sejatinya menyadari keberadaan Tuhan melalui berbagai budaya dan keseharian tradisional. Kesadaran terhadap hal tersebut justru terjadi sebelum masuknya ajaran agama impor, seperti Hindu, Budha, Islam, ataupun Kristen. Bahkan, beberapa kalangan masih mempertahankan ajaran tersebut di tengah jumlah pemeluk agama impor yang semakin mendominasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan dan budaya berbasis spiritualitas sebagai manifestasi nilai-nilai ketuhanan.

Penyatuan realitas kehidupan dengan Tuhan menjadi sesuatu yang unik dalam konsep Kemaslahatan Pancasila karena hal tersebut tidak dilakukan berdasarkan asas monopolistik semata. Manusia menjadi menyatu dengan Tuhan bukan melalui satu atau beberapa sarana, melainkan melalui banyak cara yang diyakini oleh keimanannya. Hal ini menjadi sebuah keberagaman dan sesuai dengan pendapat Soekarno (1945) mengenai ketuhanan yang berkebudayaan dalam konteks Pancasila. Ketuhanan yang berkebudayaan menggerakkan manusia untuk mengerahkan segala hikmat dan kebijaksanaan untuk menjadikan Tuhan sebagai realitas utama dalam dirinya. Implikasinya, perbedaan mengenai cara bertuhan dalam masyarakat Indonesia menjadi hal yang lumrah dan tidak perlu diperdebatkan.

Hal ini tentu memberikan gambaran bahwa Indonesia merupakan negara bertuhan yang mengakui keberagaman dan budaya. Dalam kaitannya dengan bidang akuntansi, hal tersebut muncul dari berbagai model bisnis dan akuntabilitas yang mencoba menghubungkan nilai-nilai ketuhanan. Kesadaran terhadap keberadaan Tuhan menjadi sebuah kebiasaan dalam bentuk akuntansi masyarakat Indonesia (dan tidak selalu memiliki wujud tertulis) walaupun terdapat perbedaan bentuk dan penafsiran terhadap keberadaannya. Bahkan, perbedaan tersebut semakin menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dapat bersatu walaupun terdapat makna yang berbeda mengenai keberadaan Tuhan.

Langkah kedua dalam penyatuan ini adalah menyatukan manusia dan akuntansi dengan alam semesta. Penyatuan terhadap alam semesta merupakan hal yang penting karena aktivitas ekonomi dan akuntansi selalu melibatkan unsur ini. Alam semesta merupakan media bagi manusia dalam melakukan segala aktivitas kehidupan, termasuk ekonomi dan akuntansi. Selain itu, alam semesta sejatinya merupakan ciptaan Tuhan yang diamanahkan kepada manusia untuk dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga penyatuan terhadap unsur ini juga berarti menyatukan dengan hakikatnya. Oleh karena itu, konsep Kemaslahatan Pancasila mengakui keberadaan alam semesta sebagai bagian dari proses bisnis dan pendistribusian kebermanfaatannya.

Ketika alam semesta menyatu dengan segala realitas kehidupan, manusia senantiasa menjaga dan merawat unsur ini dengan penuh keikhlasan. Manusia merasa bahwa menyakiti alam semesta sama dengan merusak keberadaan dirinya. Sebaliknya, tindakan manusia menjaga dan merawat keberadaan alam semesta merupakan bentuk kesadaran bahwa dirinya tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari unsur ini. Manusia tidak memerlukan aturan pemaksa ataupun akibat kerusakan alam semesta karena dalam dirinya terdapat keinginan secara penuh untuk menjaga dan merawat alam semesta. Proses bisnis dan pendistribusian kebermanfaatan aktivitas ekonomi dalam konsep Kemaslahatan Pancasila mengarahkan manusia untuk menyadari arti penting alam semesta sebagai bagian dari kehidupannya.

Penyatuan terhadap keberadaan alam semesta juga berarti turut menjaga kedaulatan unsur ini. Kedaulatan alam semesta merupakan hal yang penting mengingat negara tidak hanya terdiri atas manusia semata, tetapi juga alam semesta. Kedaulatan alam semesta tidak hanya sebatas pengakuan dunia internasional terhadap status wilayah, tetapi turut menjaga peruntukan dan perlakuan kepada unsur ini demi terciptanya kemaslahatan. Kedaulatan alam

semesta juga menjadi hal yang penting mengingat keberlangsungan kehidupan alam semesta juga ditentukan dari seberapa besar manusia Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan alam semesta di tengah invasi ekonomi dari pihak lain. Bahkan, keberadaan alam semesta sebagai bagian dari konsep Kemaslahatan Pancasila secara implisit mengarahkan manusia untuk menjaga kedaulatannya.

Penyatuan ini kemudian mengarah ke dalam filosofi mikrokosmos dan makrokosmos. Dalam perspektif sekuler, manusia merupakan mikrokosmos sedangkan alam semesta merupakan makrokosmos. Hal ini merupakan dualistik realitas kehidupan karena terdapat pemisahan kedudukan antara kedua unsur ini sehingga masing-masing dapat memiliki tujuan yang berbeda dalam aktivitas kehidupan. Ketika manusia dan alam semesta menjadi satu, tidak terdapat lagi istilah mikrokosmos dan makrokosmos. Manusia merupakan bagian dari alam semesta dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, konsep Kemaslahatan Pancasila memandang bahwa manusia berperan sebagai mikrokosmos dan makrokosmos sekaligus sehingga tidak terdapat keterpisahan realitas di antara keduanya.

Sikap seperti ini tentu memiliki pertentangan dengan konsep laba yang memprioritaskan materi daripada kelangsungan alam semesta. Kerusakan alam semesta pada dasarnya disebabkan oleh persaingan antarpelaku ekonomi dalam meraih laba sebesar-besarnya. Sifat ini juga disampaikan sejumlah pendapat yang menyatakan bahwa laba memancing nafsu manusia untuk merusak keberadaan alam semesta. Hal sebaliknya justru terjadi dalam konsep Kemaslahatan Pancasila yang mengarahkan setiap pelaku ekonomi untuk tidak serakah dan mengutamakan materi sehingga keberlangsungan alam semesta tetap terjaga. Oleh karena itu, konsep Kemaslahatan Pancasila dapat menjadi alternatif bagi manusia dalam merawat alam semesta melalui aktivitas ekonomi dan akuntansi.

Ketika kedua hal tersebut telah dilakukan, penyatuan terhadap kehidupan sesama manusia dapat terjadi. Manusia tidak dapat menyatukan dirinya dengan sesamanya ketika belum menyadari dan mengimplementasikan keberadaan Tuhan dengan penuh keikhlasan. Manusia juga tidak dapat menyatukan dirinya dengan sesamanya ketika masih saling berebut dan merusak alam semesta demi meningkatkan perolehan laba. Kedua penyatuan tersebut ditujukan untuk menghilangkan sifat egoisme manusia yang menimbulkan perilaku individualistik. Bahkan, kedua proses tersebut juga mengarahkan manusia dalam sistem dan perilaku (akuntansi) yang berbasis semangat gotong royong.

Penyatuan terhadap segala realitas kehidupan pada akhirnya mengarah kepada harmonisasi proses bisnis dan akuntansi. Harmonisasi tersebut tidak hanya mengarah dalam hubungan manusia semata, tetapi juga mengarah kepada kesatuan terhadap Tuhan dan alam semesta. Konsep Kemaslahatan Pancasila sebagai antitesis dari laba memberikan pandangan terhadap penyatuan masing-masing realitas kehidupan sehingga harmonisasi tersebut dapat terjadi.

7.4 Akuntansi yang Berkeadilan

“Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan faham Ratu Adil, ialah sociale rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia-baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.”

(Soekarno, 1945)

Kajian mengenai laba juga menyangkut dalam aspek keadilan, khususnya ketika dikaitkan dalam peradaban kehidupan. Keadilan menjadi sesuatu yang penting dalam laba mengingat hal ini merupakan dampak dari terwujudnya ontologi dan epistemologi di balik hal tersebut. Hal tersebut tercermin dalam

ontologi PAT dan konsep laba yang menghasilkan keadilan distributif pada aktivitas kehidupan manusia. Meskipun demikian, hal tersebut menjadi sebuah permasalahan karena asumsi ontologi dari keadilan distributif berbeda dengan keadilan sosial Pancasila yang didasarkan kepada *homo pancasilaus*. Oleh karena itu, konsep Kemaslahatan Pancasila hadir sebagai laba yang mewujudkan keadilan sosial.

Konsep Kemaslahatan Pancasila memberikan konsekuensi terhadap perspektif keadilan yang berbeda dengan keadilan distributif, khususnya pada aktivitas ekonomi. Jika keadilan distributif membentuk manusia menjadi pribadi individual, hal tersebut menjadi berbeda dalam perspektif konsep Kemaslahatan Pancasila. Hal ini tampak dalam pembahasan mengenai semangat gotong royong dan penyatuan terhadap segala realitas kehidupan. Kedua hal tersebut memberikan konsekuensi bagi laba untuk mewujudkan proses bisnis yang berbasis keadilan sosial. Dalam perkataan lain, konsep Kemaslahatan Pancasila mengarahkan setiap pelaku ekonomi untuk menjadi pribadi yang adil bagi seluruh realitas kehidupan.

Arah keadilan sosial dalam konsep Kemaslahatan Pancasila tidak hanya sebatas materi (angka) semata. Keadilan sosial pada dasarnya bermuara kepada semangat gotong royong yang notabene tidak dapat diukur melalui kacamata angka. Keadilan yang bermuara kepada angka justru membawa manusia ke dalam unsur materi dan berimplikasi terhadap dominasi rasionalitas. Sebaliknya, angka-angka dalam aktivitas ekonomi tidak perlu menjadi urgensi untuk membawa manusia kepada keadilan sosial yang utuh. Hal ini juga tercantum dalam tujuan konsep Kemaslahatan Pancasila yang tidak memberikan urgensi terhadap pelaporan ataupun standardisasi akuntansi meskipun pada sisi lain tetap mengakui keberadaan materi.

Hal pertama untuk mewujudkan akuntansi berkeadilan adalah aktualisasi prinsip keadilan berbasis nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui manusia maupun akuntansi. Nilai-nilai ketuhanan pada dasarnya menuntut manusia untuk menjadi pribadi yang berkeadilan dalam melakukan aktivitas kehidupan, khususnya dalam bidang ekonomi. Nilai-nilai ketuhanan merupakan landasan sekaligus pagar dalam melakukan aktivitas supaya manusia tidak terjebak dalam kebebasan yang seluas-luasnya. Hal yang sama juga diperlukan dalam akuntansi supaya dapat mengarahkan setiap pelaku ekonomi untuk berperilaku adil dalam pandangan Tuhan. Akuntansi yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan berketuhanan menciptakan sistem ekonomi berbasis ketuhanan peradaban.

Aktualisasi prinsip keadilan berbasis nilai ketuhanan merupakan bentuk kesadaran bahwa Tuhan merupakan realitas tertinggi dan menyatu dalam kehidupan manusia. Setiap manusia harus tunduk kepada kehendak Tuhan sebagai langkah menciptakan peradaban yang adil. Dalam kaitannya kepada bidang akuntansi, ketertundukan kepada Tuhan dapat terwujud dalam berbagai proses bisnis yang dilandasi oleh nilai ketuhanan (bahkan juga menasar kepada bentuk akuntabilitas jika diperlukan). Hal ini juga didukung oleh arah konsep Kemaslahatan Pancasila, sebagai laba, yang memiliki prinsip ketertundukan dalam proses bisnis sehingga hal tersebut dapat menciptakan peradaban berbasis keadilan.

Keadilan berbasis nilai ketuhanan dapat termanifestasi melalui sikap mengucap syukur terhadap berkah Tuhan dalam proses ekonomi. Masyarakat Indonesia memiliki serangkaian upacara adat yang digunakan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas berkahnya yang melimpah dalam aktivitas kehidupan. Sejumlah penelitian akuntansi menemukan aktivitas tersebut sebagai bagian yang terintegrasi dalam proses bisnis. Hal ini dapat dikatakan sebagai perwujudan

keadilan berbasis nilai ketuhanan karena Tuhan telah memberikan rahmat yang melimpah sehingga manusia memiliki keharusan membalas hal tersebut dengan melakukan ucapan syukur kepada-Nya. Bahkan, meskipun entitas tidak mengalami keuntungan materi, kegiatan tersebut tetap terlaksana karena rahmat-Nya tidak terbatas kepada unsur tersebut.

Meskipun demikian, keadilan berbasis nilai ketuhanan tidak terbatas kepada hal-hal yang bersifat ritual. Perubahan secara radikal akuntansi konvensional (PAT dan konsep laba), yang menegaskan keberadaan Tuhan, merupakan langkah perwujudan semangat tersebut. Bahkan, perubahan tersebut merupakan langkah revolusioner dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan berbasis ketuhanan. Hal-hal lain yang dapat diperjuangkan untuk memperjuangkan keadilan berbasis nilai ketuhanan adalah pengelolaan perusahaan berbasis nilai-nilai ketuhanan sehingga setiap pihak mendapatkan kemaslahatan dan aktivitas perekonomian. Intinya, setiap aktivitas kehidupan (terutama ekonomi dan akuntansi) tidak dapat lepas dari nilai-nilai ketuhanan untuk mewujudkan keadilan.

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa keadilan berbasis nilai ketuhanan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Arah konsep Kemaslahatan Pancasila yang membuka ruang dialektika dalam bertuhan membuka ruang mengenai perwujudan keadilan berbasis nilai ketuhanan yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia dapat menggunakan berbagai cara untuk mewujudkan keadilan berbasis nilai ketuhanan dalam bidang akuntansi sesuai dengan keyakinan iman ataupun perjalanan kehidupan spiritual. Manifestasi terhadap keberadaan Tuhan tidak hanya tercantum dalam kitab suci, tetapi juga tampak dalam nilai-nilai kebudayaan dan keseharian manusia. Bahkan, konsep Kemaslahatan Pancasila juga memberikan ruang bagi terciptanya keadilan berbasis pewahyuan dari Tuhan.

Hal kedua untuk mewujudkan akuntansi berkeadilan adalah mengarahkan manusia (dan akuntansi) untuk adil terhadap keberadaan alam semesta. Sebagai realitas kehidupan, alam semesta patut diperlakukan secara adil layaknya manusia. Hal ini juga berlaku bagi akuntansi sebagai arah manusia dalam berperilaku, terutama dalam konteks aktivitas perekonomian. Alam semesta merupakan sarana bagi Tuhan dalam memberikan berkahnya kepada manusia sehingga keadilan merupakan urgensi bagi unsur ini. Ketika alam semesta diperlakukan secara tidak adil, terjadilah kerusakan ekosistem dan manusia turut terkena imbas terhadap hal tersebut. Dalam perkataan lain, manusia dan alam semesta merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks keadilan. Oleh karena itu, konsep Kemaslahatan Pancasila memberikan arah bagi manusia untuk berperilaku adil kepada alam semesta.

Masyarakat Indonesia telah memiliki tradisi berkearifan lokal sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada alam semesta. Tradisi dapat dikatakan sebagai bentuk keadilan karena dilakukan sebagai kesadaran terhadap peran alam semesta bagi kehidupan manusia. Selain itu, tradisi tersebut juga dilakukan karena kesadaran masyarakat terhadap manifestasi alam semesta sebagai perwujudan dari keberadaan Tuhan. Unsur akuntansi menjadi urgensi karena hal tersebut merupakan bagian dari proses bisnis berbasis keadilan bagi alam semesta. Oleh karena itu, konsep Kemaslahatan Pancasila memiliki peranan untuk mengarahkan manusia berkontribusi dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Pada sisi lainnya, keberadaan alam semesta juga perlu dibela dengan berbagai pergerakan revolusioner³⁷. Pergerakan revolusioner merupakan aksi

³⁷ Paragraf ini terinspirasi dari pergerakan yang dilakukan oleh para petani Kedung, Jawa Tengah, untuk menutup pabrik semen. Mereka merasa keberadaan pabrik tersebut dapat merusak ekosistem setempat meskipun pihak perusahaan menawarkan berbagai alternatif terkait hal tersebut. Hal ini dapat menjadi telaah kritis bagi akuntansi (khususnya bidang pertanggungjawaban sosial berbasis

yang dilakukan rakyat untuk mengusir praktik penjajahan oleh perusahaan ataupun pihak lain. Pergerakan ini dilakukan melalui langkah-langkah revolusioner, seperti demo, melakukan pemboikotan, ataupun menutup perusahaan secara paksa. Pergerakan revolusioner menjadi urgensi dalam mewujudkan keadilan bagi alam semesta karena hal tersebut mampu mengatasi penjajahan terhadap unsur ini dalam waktu singkat. Selain itu, pergerakan revolusioner terhadap alam semesta merupakan awal bagi mewujudkan tatanan berkeadilan terhadap unsur ini.

Hal ketiga untuk mewujudkan akuntansi berkeadilan adalah pembentukan perasaan sama rasa kepada sesama manusia. Manusia memang memiliki perbedaan tugas dan karakter dalam dirinya. Meskipun demikian, hal tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk menghilangkan kesamaan rasa dalam dirinya. Kesamaan rasa merupakan hal yang penting untuk menimbulkan sifat persaudaraan dan saling menghormati dalam diri manusia dalam rangka mewujudkan tata kehidupan berkeadilan. Sebaliknya, sifat individualistik hanya akan membentuk sikap berkeadilan berbasis egoisme sehingga tatanan kehidupan berkeadilan tidak dapat terwujud.

Pada perspektif akuntansi, konsep Kemaslahatan Pancasila memberikan arah bagi setiap manusia untuk mewujudkan sama rasa melalui proses bisnis. Keadilan tersebut termanifestasi melalui rasa ikhlas, sebagai bentuk perjuangan, dalam melakukan proses bisnis. Selain itu, keadilan dengan penggunaan sama rasa juga tampak dari pendistribusian hasil aktivitas dengan hikmat dan kebijaksanaan manusia. Hal-hal tersebut menjadikan akuntansi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan.

PAT yang menempatkan laba di atas keberadaan alam semesta). Selain itu, hal ini dapat menjadi cermin bagi setiap entitas untuk mengutamakan kemaslahatan bagi setiap unsur kehidupan daripada perolehan laba.

Keadilan seperti ini dapat mengarahkan manusia dan akuntansi kepada pergerakan revolusi dalam membela keberadaan sesamanya. Manusia (dalam pandangan *homo pancasilaus*) tidak dapat menerima ketika sesamanya tidak diperlakukan adil oleh kalangan tertentu. Rasa tersebut kemudian berimplikasi terhadap munculnya pergerakan sosial untuk menegakkan keadilan bagi sesama manusia.

Pergerakan serikat buruh ataupun petani merupakan contoh nyata dari aktualisasi konsep Kemaslahatan Pancasila dalam kaitannya kepada berkeadilan berdasarkan sama rasa. Serikat buruh ataupun petani pada dasarnya merupakan wadah yang dibuat oleh rakyat dalam memperjuangkan keadilan bagi sesama manusia. Semangat terhadap pergerakan ini merupakan refleksi mengenai arah konsep Kemaslahatan Pancasila supaya menjadi penggerak rakyat untuk memperjuangkan keadilan walaupun terdapat peluang politisasi di dalamnya.

Ketiga aspek keadilan dalam konsep Kemaslahatan Pancasila menunjukkan bahwa sifat berkeadilan sosial (sebagai manifestasi Pancasila) tidak hanya dilakukan melalui hal-hal yang bersifat ritual. Hal-hal yang bersifat pergerakan revolusioner juga dapat mencerminkan nilai keadilan sosial selama tidak dilakukan demi kepentingan berbasis individualistik. Manusia dapat memilih cara-cara yang dapat dilakukannya untuk mewujudkan asas keadilan asalkan Pancasila tetap menjadi dasar utama dalam dirinya.

Meskipun demikian, keadilan dalam konsep Kemaslahatan Pancasila tidak dapat dikatakan sebagai ukuran mutlak karena setiap manusia memiliki konsep tersendiri mengenai sesuatu yang adil. Keadilan dalam perspektif konsep Kemaslahatan Pancasila dibangun atas dasar *homo pancasilaus* sehingga memungkinkan terjadinya penafsiran lain ketika terdapat hakikat manusia yang berbeda. Hal ini bukanlah sesuatu yang patut dikhawatirkan ilmu akuntansi yang

akan berkembang ketika terdapat dialektika, terutama ketika Tuhan menjadi sebagai sumber utama.

7.5 Pengambilan Keputusan yang Utuh

“Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek-ecomische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini.”
(Soekarno, 1945)

Pada aspek teknis, prinsip dalam konsep Kemaslahatan Pancasila memberikan bentuk pengambilan keputusan yang utuh. Pengambilan keputusan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang utuh ketika memberikan kemaslahatan bagi semua pihak. Hal ini menjadi sebuah urgensi karena setiap keputusan dari aktivitas bisnis memerlukan keputusan yang saling memenuhi harapan bagi setiap kalangan. Ketika keputusan hanya menguntungkan segelintir pihak, terjadilah konflik dan perpecahan dalam aktivitas perekonomian. Sebaliknya, keputusan yang mengakomodasi kepentingan setiap kalangan mampu menciptakan sistem ekonomi yang sinergi. Oleh karena itu, akuntansi (konsep Kemaslahatan Pancasila) memiliki peran penting dalam mewujudkan pengambilan keputusan yang utuh.

Pada sisi lainnya, pengambilan keputusan yang utuh juga menjadi jalan bagi manifestasi nilai keadilan. Nilai keadilan dapat terwujud ketika dalam setiap keputusan yang memberikan rasa adil bagi setiap kalangan (lihat prinsip keadilan sosial Pancasila). Selain itu, keputusan dapat dikatakan adil ketika mampu membawa manusia terhadap kesatuan terhadap realitas kehidupan yang lain (Tuhan dan alam semesta). Hal ini baru dapat dilakukan jika setiap pelaku ekonomi menggunakan hikmat dan kebijaksanaan yang dimiliki dalam melakukan pengambilan keputusan. Bahkan, hikmat dan kebijaksanaan juga harus digunakan

dalam pelaksanaan keputusan sehingga rasa keadilan dapat tercapai melalui konsep dan praktiknya.

Dalam perspektif tersebut, konsep Kemaslahatan Pancasila justru menjadikan materi sebagai unsur penunjang dalam proses bisnis. Sebaliknya, konsep Kemaslahatan Pancasila memprioritaskan unsur-unsur nonmateri sebagai landasan dalam aktivitas perekonomian sehingga berimplikasi terhadap besarnya kemungkinan munculnya keputusan di luar rasionalitas manusia. Hal ini memberikan pandangan bahwa keadilan sesungguhnya berada di luar ranah materi, khususnya pada aspek pengambilan keputusan. Keadilan tidak lagi harus terwujud dalam unsur materi (dan terlihat), tetapi juga termanifestasi dalam hal-hal lain yang memberikan sinergi antarmanusia maupun realitas kehidupan lainnya.

Manusia mengalami kesulitan dalam menentukan keadilan jika harus membuat pengambilan keputusan berbasis materi. Penafsiran manusia terhadap materi sejatinya berbeda³⁸ dan hal tersebut turut berkontribusi terhadap perbedaan pandangan mengenai keadilan. Ketika manusia harus mengambil keputusan dengan berpatokan kepada materi, hal tersebut memancing konflik antarsesama atau berbeda golongan walaupun terdapat perubahan perhitungan dari berbagai waktu. Meskipun pengambilan keputusan berbasis nonmateri juga tidak lepas dari permasalahan keadilan, hal tersebut setidaknya memberikan ruang bagi manusia untuk mengaktualisasi dirinya untuk membangun peradaban yang utuh.

Dalam kondisi ekstrim, pengambilan keputusan berdasarkan konsep Kemaslahatan Pancasila tampak ketika perusahaan mengalami kerugian secara

³⁸ Kamayanti (2017) memberikan kesulitan tersebut dalam ilustrasi pembagian gaji berdasarkan faham ideologi. Seorang kapitalis memberikan gaji berdasarkan prestasi yang diraih oleh pelaku usaha. Sebaliknya, seorang komunis memberikan gaji sama rata. Perspektif berbeda dilakukan oleh seorang sosialis yang memberikan gaji berdasarkan kebutuhan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa manusia sangat sulit memberikan keputusan yang adil jika harus berbasis kepada materi. Oleh karena itu, beberapa perspektif hadir sebagai antitesis materi, seperti spiritual, religius, dan keilahian (Cahyanto dan Parikesit, 2011; Boyce, 2014; Triyuwono, 2015b).

materi, tetapi membawa kemaslahatan bagi semua pihak³⁹. Secara rasional, perusahaan harus ditutup ataupun diwaspadai karena hal tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap *going concern* pada masa mendatang. Meskipun demikian, jika kita berkaca dalam perspektif konsep Kemaslahatan Pancasila, perusahaan harus tetap dilanjutkan karena mampu memberikan energi positif bagi semua pihak. Bahkan, setiap kalangan harus memberikan upaya supaya kegiatan perusahaan tersebut dapat terselamatkan. Pemikiran ini merupakan sesuatu yang adil karena pada dasarnya setiap unsur kehidupan harus mengimplementasikan keadilan sosial bagi kemaslahatan setiap realitas kehidupan.

Hal sebaliknya juga dapat terjadi dalam perusahaan yang memiliki keuntungan secara materi, tetapi memberikan dampak buruk bagi manusia dan realitas kehidupan lainnya⁴⁰. Dalam sudut pandang rasional, perusahaan tersebut harus dipertahankan karena mampu menghasilkan keuntungan materi. Meskipun demikian, sudut pandang konsep Kemaslahatan Pancasila menghendaki perusahaan tersebut ditutup karena merugikan banyak pihak. Ketika perusahaan hanya memberikan keadilan bagi segelintir pihak semata (bahkan menegasikan keberadaan Tuhan dalam kegiatannya), penutupan merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap kalangan.

Ilustrasi tersebut juga memberikan gambaran bahwa manusia (ketika menginternalisasi nilai-nilai Pancasila) tidak perlu terdikotomi dalam keputusan yang berbasis kepada materi dan justru harus memikirkan mengenai cara supaya aktivitas ekonomi menghasilkan kemaslahatan demi keadilan sosial. Keuntungan materi hanya membuat manusia terpenjara dalam pemikiran rasional dan menegasikan keberadaan realitas lain di sekitarnya. Bahkan, Watts dan

³⁹ Ilustrasi mengenai hal ini telah dijabarkan pada Bab 5 (cerita Nyai Ontosoroh).

⁴⁰ Kegiatan investasi perusahaan multinasional justru menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat dan lingkungan karena terdapat ambisi untuk meraih laba sebesar-besarnya (lihat Mulawarman, 2012; Bellamy dan Foster, 2013; Tinker, Sy dan Saxe, 2016).

Zimmerman (1986) secara tersirat mengakui bahwa keuntungan materi memancing manusia untuk melakukan tindakan oportunistik. Oleh karena itu, arah konsep Kemaslahatan Pancasila yang tidak memprioritaskan materi menjadi urgensi untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Ketika manusia tidak melakukan dikotomi antara laba ataupun rugi (sebagai representasi materi), aktivitas perekonomian justru berjalan sebagai pembebasan. Dalam hal ini, Triuwono (2012) memberikan gambaran mengenai perolehan materi aktivitas perekonomian. Ketika perusahaan mengalami surplus secara materi (laba) hal tersebut harus disyukuri sebagai rejeki bagi pihak internal. Sebaliknya, ketika perusahaan mengalami defisit secara materi (rugi), hal tersebut tetap harus disyukuri karena terdapat kontribusi dari perusahaan kepada pihak luar. Meskipun pendapat tersebut perlu digali lebih lanjut dalam konteks keadilan sosial, hal tersebut (ketika terimplementasi) berdampak kepada aktivitas ekonomi yang tidak berbasis kepada oportunitas ataupun penciptaan keadilan yang hanya mengedepankan rasionalitas dalam pengambilan keputusan.

Saya mengakui bahwa filosofi ini tentu menjadikan akuntansi sebagai sesuatu yang tidak netral dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, konsep Kemaslahatan Pancasila juga memiliki keberpihakan kepada rakyat sehingga akuntansi yang dianut juga tidak netral. Meskipun demikian, segala sesuatu yang terdapat dalam dunia ini pada dasarnya tidak bersifat netral. Setiap realitas yang berada di dunia ini (termasuk akuntansi) memiliki keberpihakan kepada pihak tertentu. Hal tersebut pada akhirnya memberikan arah bahwa akuntansi tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang bebas nilai.

Pengambilan keputusan akuntansi berbasis PAT dan laba juga tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang netral. Sejumlah konsep akuntansi (sebagai alat untuk melakukan pengambilan keputusan) sejatinya merupakan sesuatu yang tidak netral karena memiliki keberpihakan kepada pemilik modal. Selain itu, tujuan

PAT sebagai alat untuk pengambilan keputusan bagi pemilik modal justru semakin menunjukkan keberpihakan tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan konsep Kemaslahatan Pancasila yang memiliki keberpihakan kepada rakyat (terutama kaum termarginalkan) dalam membangun akuntansi. Implikasinya, setiap pengambilan keputusan juga tidak netral dan memiliki keberpihakan.

Meskipun pengambilan keputusan memiliki keberpihakan kepada rakyat (bukan pemilik modal), kemaslahatan kepada setiap golongan tetap terjadi. Musyawarah (sekaligus sebagai jati diri bangsa Indonesia) yang dilakukan setiap golongan merupakan langkah bagi terciptanya kemaslahatan tersebut. Setiap pihak terkait harus membicarakan arah dan masa depan aktivitas perekonomian bagi kemaslahatan bersama. Bahkan, kemaslahatan tersebut tidak terbatas kepada dimensi manusia semata, tetapi juga mengarah kepada dimensi alam semesta dan Tuhan, sebagai unsur tertinggi kehidupan.

Proses pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah juga dapat dikatakan sebagai langkah mewujudkan semangat persaudaraan. Semangat tersebut tampak ketika setiap golongan (tidak hanya pemilik modal) saling berkumpul dalam membicarakan masa depan perekonomian untuk kemaslahatan. Setiap pihak harus menahan egonya karena musyawarah (dalam pandangan Pancasila) tidak menghendaki adanya pembentukan keputusan yang hanya mengandalkan kekuasaan. Ketika ego masing-masing pihak telah tertahankan, keputusan yang dihasilkan dapat memberikan kepuasan bersama⁴¹. Implikasinya, potensi konflik yang dialami oleh setiap golongan terkait menjadi tereduksi dan kebersamaan dalam sistem ekonomi dapat tercipta.

⁴¹ Hatta (1987) bahkan menggambarkan bahwa musyawarah merupakan bentuk pengambilan keputusan yang memberikan kemaslahatan ekonomi. Badan usaha (yang digambarkan dengan koperasi) menjadi wadah kesejahteraan bersama ketika setiap kebijakan dilakukan dengan cara musyawarah. Pada sisi lainnya, pengambilan keputusan yang mengutamakan laba dan melibatkan golongan tertentu memiliki potensi benturan dalam kehidupan masyarakat (Bryer, 2006).

Dalam aspek akuntansi, musyawarah merupakan bentuk penciptaan akuntabilitas dengan mengedepankan aspek kemaslahatan. Ketika PAT dan laba hanya mengarahkan akuntabilitas kepada segelintir pihak (karena dilatarbelakangi oleh individualitas), musyawarah justru menjadi alat yang bersifat sebaliknya. Musyawarah menjadi wadah untuk menciptakan akuntabilitas berbasis kemaslahatan dengan melibatkan setiap golongan manusia pada proses bisnis. Bahkan, musyawarah dapat menjadi sarana bagi pembentukan akuntabilitas bagi Tuhan dan alam semesta melalui serangkaian keputusan yang tercipta dengan kesadaran tersebut.

Saya mengakui bahwa musyawarah juga tidak bisa menjawab tuntutan dari semua golongan manusia. Meskipun demikian, hal ini juga tidak bisa dipandang sebagai sebuah kelemahan dari musyawarah. Kunci dari keberhasilan musyawarah adalah penekanan ego dari setiap golongan manusia. Selama manusia masih mempertahankan sifat ego demi kesejahteraan individu, apa pun bentuk akuntansi tidak bisa memberikan kemaslahatan bagi semua pihak.

7.6 Konsep Kemaslahatan Pancasila sebagai Cita-Cita dan Kenyataan

Maka dari itu, jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu, menjadi satu *realiteit*, yakni jikalau kita ingin hidup menjadi satu bangsa, satu *nationaliteit* yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup diatas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan *sociale rechtvaardigheid*, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, dengan ketuhanan yang luas dan sempurna, janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perjuangan, perjuangan, dan sekali lagi perjuangan.
(Soekarno, 1945)

Studi ini pada dasarnya mengonstruksi alternatif laba yang utuh dengan menggunakan Pancasila sebagai landasan. Dalam hal ini, penggunaan Pancasila sebagai landasan menunjukkan upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk memiliki kedaulatan dalam segala bidang, khususnya pada aspek ekonomi

dan akuntansi. Kedaulatan tersebut menjadi urgensi mengingat kejayaan bangsa Indonesia dapat dicapai ketika memiliki jati diri dan tidak bergantung kepada (dominasi) kebijakan pihak lain. Bahkan, kedaulatan tersebut sejatinya bukan hanya berhenti dalam tingkat konsep semata, melainkan juga harus tertanam dan terimplementasi dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Cita-cita ini sebenarnya bukan hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia semata. Masyarakat di seluruh dunia, khususnya kaum termarginalkan, juga memiliki hal demikian. Mereka memiliki keinginan untuk terbebas dari dominasi modernitas sehingga memiliki jati diri dalam melakukan aktivitas kehidupan. Selain itu, mereka tidak ingin terjajah oleh modernitas yang pada akhirnya mereduksi keberadaan sebagai manusia seutuhnya. Implikasinya, mereka melakukan gerakan perlawanan sebagai upaya untuk membebaskan penjajahan dan mengubah struktur sosial yang mencederai jati dirinya. Pembebasan tersebut kemudian menghasilkan bentuk kedaulatan yang berpihak kepada masyarakat termarginalkan, baik melalui konsep maupun praktik.

Hal ini juga terefleksi dari bentuk-bentuk antitesis dari akuntansi konvensional (baik terhadap PAT maupun laba) yang selama ini dibuat oleh beberapa pihak. Sejumlah konsep alternatif akuntansi yang dimunculkan oleh beberapa peneliti menjadi sebuah bukti adanya upaya membuat antitesis PAT dan laba. Terlepas dari sesuai atau tidaknya konsep tersebut dengan nilai-nilai Pancasila, hal ini menunjukkan bahwa akuntansi yang berdaulat telah menjadi keinginan dari berbagai golongan masyarakat. Dalam hal ini, akuntansi tidak lagi digunakan sebagai alat semata, tetapi wadah untuk mewujudkan pembebasan dalam struktur sosial masyarakat. Selain itu, akuntansi telah menjadi sarana untuk manifestasi jati diri masyarakat dalam aktivitas kehidupan, khususnya pada aspek perekonomian.

Pada sisi lainnya, ketika konsep Kemaslahatan Pancasila telah tertanam sebagai kesadaran bagi manusia dan akuntansi, kemunculan tatanan dunia yang baru dapat terjadi. Kemunculan ini dapat ditelaah dalam berbagai aspek. Dalam perspektif ekonomi dan akuntansi, perubahan dapat terjadi dengan munculnya nilai-nilai Pancasila sebagai landasan. Sistem ekonomi dan akuntansi tidak lagi terpaku kepada nilai-nilai individualisme dan materi, tetapi berusaha menghadirkan keberadaan Tuhan dalam berbagai bentuk. Selain itu, sistem ekonomi dan akuntansi tidak lagi berpatokan kepada pengambilan keputusan berbasis materi, tetapi bergantung kepada kehendak Tuhan dan kemaslahatan bagi setiap realitas kehidupan.

Sistem ekonomi dan akuntansi yang berketuhanan (bahkan berbasis konsep Kemaslahatan Pancasila) bukanlah hal yang mustahil untuk dibentuk. Sejumlah peneliti memunculkan berbagai konsep berketuhanan dalam aspek ekonomi dan akuntansi. Zohar dan Marshall (2004), misalnya membuat konsep *spiritual capital* yang memiliki arah bahwa perusahaan harus mempertimbangkan unsur-unsur nonmateri sebagai penentu keberlangsungan kehidupan (*going concern*). Pada sisi lainnya, Baydoun dan Willet (1888) mengusulkan konsep Nilai Tambah Islam sebagai antitesis laba berdasarkan pendekatan religi. Meskipun penelitian tersebut juga memerlukan tinjauan lebih lanjut, terutama dalam nilai ketuhanan Pancasila, hal tersebut merefleksikan upaya menghadirkan Tuhan dalam sistem ekonomi dan akuntansi.

Dalam perspektif manusia, sifat-sifat yang terdapat pada PAT menjadi luntur melalui *homo pancasilaus* sebagai landasan dalam konsep Kemaslahatan Pancasila. Manusia tidak lagi melakukan pengambilan keputusan dengan mengandalkan pemikiran rasional, tetapi mengedepankan kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam dirinya. Selain itu, manusia memiliki kepekaan terhadap sesama dan alam semesta dan melakukan unsur-unsur tersebut seperti dirinya sendiri.

Bahkan, tujuan kehidupan manusia tidak lagi terbatas kepada perolehan unsur-unsur materi, tetapi mengarah kepada aktualisasi diri dengan menjadikan Tuhan sebagai pusat ketertundukan. Hal ini pada akhirnya membentuk kepribadian manusia yang etis secara utuh.

Ujung dari perubahan ini adalah munculnya peradaban yang utuh. Peradaban ini tidak lagi bersifat parsial, tetapi menyatukan segala realitas kehidupan dalam ketertundukan kepada Tuhan. Selain itu, peradaban yang utuh merupakan era di mana manusia dan akuntansi tidak lagi terbatas dalam kepentingannya sendiri, tetapi turut serta dalam pembangunan dunia yang bersifat menyeluruh. Peradaban inilah yang mengarahkan manusia kepada puncak pencarian jati diri kehidupan. Dalam perspektif universal, peradaban yang utuh menjadi jalan bagi terciptanya jalinan persaudaraan bagi setiap golongan manusia.

Konsep Kemaslahatan Pancasila masih belum bisa terlaksana karena ada beberapa permasalahan penting. Permasalahan pertama adalah kedudukan PAT dan laba yang telah tertanam dalam diri manusia, khususnya bangsa Indonesia. PAT dan laba telah menjadi bentuk akuntansi baku bagi sistem perekonomian Indonesia. Hal ini kemudian berimplikasi terhadap pengembangan teori dan praktik akuntansi yang masih didominasi oleh PAT dan laba. Selain itu, dominasi ini juga berdampak kepada pola pendidik dan pendidikan akuntansi (sebagai sarana penanaman nilai) di Indonesia yang juga dibangun dengan mengadopsi nilai-nilai demikian. Ketika dominasi tersebut masih terjadi, perwujudan konsep Kemaslahatan Pancasila masih terbatas dalam tataran teori.

Permasalahan kedua adalah struktur kekuasaan ekonomi yang masih didominasi oleh korporasi. Pembahasan sebelumnya telah menyatakan bahwa aktor perekonomian utama adalah pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Hal ini menjadi permasalahan ketika kepentingan perusahaan justru menjadi prioritas

utama dalam pengembangan kebijakan ekonomi dan akuntansi. Dominasi kepentingan perusahaan dalam struktur ekonomi dan akuntansi menyebabkan terjadinya hubungan tidak sejajar antarmanusia. Sebaliknya, kepentingan masyarakat menjadi terabaikan dalam pengembangan kebijakan ekonomi dan akuntansi. Bahkan, dominasi inilah yang sejatinya menyebabkan pengembangan akuntansi didominasi oleh PAT dan laba.

Permasalahan ketiga adalah masih adanya akademisi yang menegasikan pola pengembangan akuntansi yang memiliki antitesis terhadap PAT dan laba. Hal ini terjadi sebagai akibat dari dominasi PAT dan laba pada struktur ekonomi dan akuntansi. Banyak akademisi yang masih menganggap bahwa pengembangan akuntansi terpenting adalah PAT dan laba. Sebaliknya, pengembangan akuntansi berbasis nonpositivistik (termasuk jika dikaitkan kepada nilai-nilai Pancasila) merupakan keanehan sehingga mendapatkan porsi pengembangan yang sangat kecil. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Indonesia semata, tetapi juga merambah dalam pengembangan akuntansi secara global. Bahkan, beberapa jurnal akuntansi menolak artikel akuntansi berbasis nonpositivis karena tidak sesuai dengan kepentingan mereka.

Ketiga permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui perjuangan bersama rakyat Indonesia dalam membentuk peradaban yang utuh. Soekarno (1945), sebagai *founding father* Pancasila selalu menekankan adanya perjuangan dari setiap golongan masyarakat untuk dalam mewujudkan cita-cita sebagai sebuah kenyataan. Dalam hal ini, beliau menekankan bahwa masyarakat harus berjuang untuk mewujudkan Pancasila sebagai sebuah realitas kehidupan. Hal tersebut tentu harus menjadi sebuah semangat untuk menjadikan Pancasila sebagai sebuah landasan bagi laba (Cahyanto dan Parikesit, 2011). Selain itu, konsep Kemaslahatan Pancasila dapat terlaksana bergantung dari kemauan masyarakat untuk mewujudkannya.

Perjuangan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu cara tersebut adalah melalui penyadaran terhadap setiap manusia. Perjuangan ini merupakan bentuk evolusi dari perubahan akuntansi melalui pola pemikiran manusia. Berbagai golongan masyarakat diberikan kesadaran secara perlahan mengenai arti penting Pancasila sebagai sebuah ideologi dan implementasinya dalam segala bidang, termasuk akuntansi. Hasil pendekatan ini adalah perubahan struktur akuntansi secara perlahan-lahan.

Pada titik ekstrem, pergerakan sosial secara frontal merupakan cara untuk melakukan perubahan terhadap akuntansi. Pergerakan sosial merupakan langkah mewujudkan perubahan akuntansi dengan cara cepat. Pergerakan ini pada dasarnya menempatkan Pancasila sebagai sebuah ideologi revolusioner. Jika pendekatan penyadaran memberikan perubahan dalam bentuk kesadaran, pergerakan sosial menggerakkan setiap anggota masyarakat untuk bergerak melakukan perubahan. Hasil yang tercipta melalui pendekatan ini adalah perubahan bentuk akuntansi secara radikal.

Kedua pendekatan tersebut hanya merupakan contoh semata. Setiap manusia dapat melakukan perubahan dengan menggunakan pendekatan berbeda, sesuai dengan landasan yang dianut. Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan, terutama ketika dikaitkan dengan situasi masyarakat yang majemuk. Meskipun demikian, hal yang terpenting adalah ketika permasalahan tersebut terselesaikan, akuntansi Pancasila tidak lagi menjadi cita-cita (*das sein*), melainkan terwujud dalam kenyataan (*das sollen*).

7.7 Kesimpulan

Refleksi ini menunjukkan bahwa konsep Kemaslahatan Pancasila mampu memberikan perubahan ketika diterapkan dalam kehidupan nyata. Konsep Kemaslahatan Pancasila memberikan arah bagi pengembangan akuntansi yang

tidak lagi terpaku kepada unsur materi, seperti PAT dan laba. Selain itu, konsep Kemaslahatan Pancasila mengarahkan manusia untuk menjadi pribadi berketuhanan dan berperikemanusiaan dalam aktivitas kehidupan. Ujung dari perubahan ini adalah manusia dan akuntansi yang berkeadilan dalam ketertundukan kepada Tuhan.

Konsep Kemaslahatan Pancasila berhenti dalam tataran konsep jika masyarakat tidak melakukan perubahan terhadap akuntansi. Selama masyarakat tidak melakukan perubahan, PAT dan laba masih mendominasi struktur ekonomi dan akuntansi di Indonesia. Bahkan, penjajahan ekonomi dan akuntansi di Indonesia masih terjadi karena tidak adanya langkah perubahan dari masyarakat.

Pergerakan ini dapat dilakukan melalui berbagai perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dapat memilih berbagai pendekatan perjuangan sesuai dengan keyakinannya. Hal yang terpenting adalah kesatuan hati dari berbagai golongan masyarakat untuk bersatu melakukan perubahan manusia dan akuntansi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.